

Analisis Mendalam Mengenai Implementasi Sistem Informasi Dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Lingkup Pkk Provinsi Lampung

Eka Ubaya Taruna Rauf¹, Wisnaningsih², Farida Juwita³, Intan Suri⁴

Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai, Bandar Lampung, Indonesia.

Email: ekaubaya77@gmail.com

ABSTRACT

The province of Lampung implements the Family Empowerment and Welfare Information System (SIPPK). The management of this system is based on the work programs of the PKK Mobilizing Team, aimed at facilitating online services for the team and emphasizing the importance of family empowerment and welfare programs. However, it is observed that the cadres face challenges due to inadequate equipment, limited work facilities, and unappealing communication methods, which hinder the implementation of family empowerment and welfare programs. This affects the cadres' performance in carrying out the PKK programs optimally. When the information system is not well implemented, the cadres struggle to identify or plan programs that meet community needs. They also face difficulties in gathering, mobilizing, and nurturing community potential, particularly families, leading to less effective implementation of PKK programs. This study aims to understand the implementation of the Family Empowerment and Welfare Information System and assess the performance of PKK cadres in Lampung province. Data was collected through observations, interviews, and documentation, and analyzed qualitatively. The results show that the implementation of the information system in Lampung faces challenges, such as the lack of supporting devices like laptops or projectors, which hinders effective communication and socialization. This leads to monotonous, less engaging communication and affects the cadres' performance in executing the Family Empowerment and Welfare Information System.

Keywords: *Implementation; System, Information; Performance; Cadres; Mobilizers.*

Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bernegara, manusia sebagai warga negara membutuhkan layanan dari pemerintah atau birokrasi untuk mengatur kekuasaan, yang dikenal sebagai pelayanan publik (public service) (Indrayani et al., 2022). Secara mendasar, setiap individu memerlukan interaksi dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Menurut EUT Rauf dkk, 2004. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan kehidupan sosial sekaligus bernegara. Salah satu contohnya adalah kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan. Manusia memerlukan keberadaan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia (Mina Khikatul, 2018:12).

PKK adalah gerakan nasional pembangunan masyarakat yang berakar dari masyarakat itu sendiri, dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat. Tujuan gerakan ini adalah menciptakan keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, mandiri, serta mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, PKK juga berfokus pada peningkatan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap lingkungan, dengan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

Menurut Budi Sutedja (2019), *Sistem Informasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga* (SI-PKK) merupakan sebuah sistem yang terdiri atas data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, serta sumber daya manusia yang saling terhubung dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan. Ayu Cahyati (2017) menambahkan bahwa pelaksanaan SI-PKK bertujuan untuk meningkatkan kinerja para kader Tim Penggerak PKK, yang perannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan secara menyeluruh. Muhammad Anshar (2017) menyatakan bahwa salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik adalah Tim Penggerak PKK di Provinsi Lampung. Di instansi ini, pelayanan terkait pelaksanaan SI-PKK dilakukan oleh kader Tim Penggerak PKK. Sementara itu, menurut Erwan Agus Tangkilisan (2018), tugas seorang kader meliputi menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga, guna mewujudkan program-program Tim Penggerak PKK.

Provinsi Lampung mengimplementasikan Sistem Informasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. "Risa Aprilia, 2021. Pengelolaan kebijakan Sistem Informasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Lampung didasarkan pada program program kerja Tim Penggerak PKK yang dimana diharapkan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan Tim Penggerak PKK secara online dan pentingnya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Oleh karena itu, jika Sistem Informasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tidak diimplementasikan, dampaknya akan kurang optimal. Kader Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung akan kesulitan mengetahui dan merencanakan program-program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, mereka juga tidak dapat mengumpulkan, menggerakkan, maupun membina potensi masyarakat, khususnya keluarga, untuk mendukung pelaksanaan program-program Tim Penggerak PKK.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Meningkatkan Kinerja Kader Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tahapan-tahapan sistematis, dimulai dari identifikasi dan perumusan masalah, penentuan tujuan serta manfaat penelitian, pencarian kajian pustaka, hingga pemilihan metode penelitian yang mencakup penetapan subjek dan sumber informasi, pengumpulan serta pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan metode ilmiah serta mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku (Azwar, 2018:6).

Subjek dalam penelitian ini adalah Kader Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung. Adapun sumber informasi yang diperoleh dari orang-orang yang memahami akan permasalahan yang peneliti akan teliti yaitu sebanyak 5 (lima) orang Kader PKK Provinsi Lampung. Adapun ketiga orang tersebut adalah :

- 1 Fitrianta Damhuri, S.STP., M.Si
- 2 Ir.Siti Fatimah Fredy, M.M
- 3 Drg. Hellen Veranica Mulyadi
- 4 Ir. Achyati Kusnardi
- 5 Desnely Ardianingsih, M.Kes

Penelitian ini menggunakan tiga metode utama pengumpulan data yakni:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan informasi atau data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada lokasi objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung atau tatap muka dengan informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas yang melibatkan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, serta penemuan kembali dokumen-dokumen yang telah disimpan.

Hasil dan Pembahasan

Terdapat berbagai model implementasi yang dikemukakan oleh para ahli, yang dapat digunakan untuk menjelaskan proses penerapan sistem informasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Pemahaman terhadap implementasi akan lebih mudah jika menggunakan model atau kerangka pemikiran tertentu. Dalam penelitian ini, model implementasi yang dipilih adalah model yang dikembangkan oleh Edward III, sebagaimana dijelaskan oleh Subarsono (2019:90). Model ini mencakup empat faktor utama yang memengaruhi efektivitas implementasi sistem informasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.

Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan dalam menyampaikan informasi oleh kader Tim Penggerak PKK kurang menarik bagi masyarakat. Hal ini disebabkan metode komunikasi yang monoton sehingga menimbulkan kejenuhan. Padahal, komunikasi merupakan faktor kunci dalam implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III, sebagaimana dikutip oleh Subarsono (2019), komunikasi adalah proses penyampaian atau pertukaran ide, gagasan, atau informasi antara individu menggunakan simbol yang dipahami oleh kedua belah pihak.

Para ahli sepakat bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi dari individu yang memiliki informasi kepada individu lain yang membutuhkannya. Dalam konteks pelaksanaan sistem informasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, komunikasi menjadi proses transfer informasi dari kader Tim Penggerak PKK kepada masyarakat. Informasi tersebut mencakup data, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang relevan.

Komunikasi dalam pelaksanaan sistem informasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk mengubah perilaku masyarakat agar mendukung penerapan sistem tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat George C. Edward III yang menyatakan bahwa komunikasi tidak hanya bersifat informatif untuk memberikan pemahaman, tetapi juga bersifat persuasif untuk mendorong penerimaan dan tindakan sesuai dengan informasi yang disampaikan. Dengan demikian, komunikasi juga bertujuan memengaruhi penerima agar mau menerima ide atau informasi serta bertindak berdasarkan hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya merupakan faktor penting dalam kesuksesan implementasi sistem informasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Salah satu sumber daya tersebut adalah sumber daya manusia. Dalam hal ini, jumlah sumber daya manusia di PKK Provinsi Lampung hanya empat orang, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem informasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga masih sangat terbatas. Sumber daya (resources) memainkan peran krusial dalam implementasi kebijakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Edward III dalam Subarsono (2019:90), meskipun aturan dan ketentuan kebijakan jelas dan konsisten, serta disampaikan dengan akurat, jika para pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas tersebut, maka kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi sistem informasi keluarga. Edward III (dalam Subarsono, 2019) mengidentifikasi beberapa indikator untuk menilai sejauh mana sumber daya dapat berjalan dengan efektif dan baik, yaitu:

a. Staf: Sumber daya utama dalam implementasi sistem informasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga adalah kader atau, lebih tepatnya, pegawai tingkat bawah (street-level bureaucrats). Salah satu penyebab kegagalan dalam implementasi sistem ini adalah kurangnya jumlah kader, kurang kompeten, atau tidak memadai dalam bidangnya. Selain penambahan jumlah kader, keberhasilan implementasi juga memerlukan kecukupan pelaksanaan dengan adanya kader yang memiliki keahlian, kemampuan, serta kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh atasan.

b. Informasi: Dalam implementasi sistem ini, informasi memiliki dua bentuk utama: pertama, informasi terkait cara pelaksanaan sistem, di mana implementor perlu mengetahui langkah-langkah yang harus diambil saat diberikan perintah untuk bertindak. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang berlaku.

c. Wewenang: Secara umum, kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Wewenang merupakan otoritas atau legitimasi bagi pelaksana dalam menjalankan sistem informasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang ditetapkan secara politik. Tanpa adanya kewenangan, implementor tidak memiliki legitimasi di mata publik, yang bisa menghambat proses implementasi sistem tersebut.

d. Fasilitas Fisik: Fasilitas atau sarana dan prasarana juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Meskipun implementor memiliki jumlah kader yang memadai, memahami tugas mereka, dan memiliki kewenangan, tanpa fasilitas pendukung yang memadai, implementasi sistem informasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tidak akan berhasil.

Hasil penelitian diketahui bahwa disposisi dapat diartikan sebagai sikap dari pelaksana dalam mengimplementasikan sistem informasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Implementasi sistem informasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang berhasil maka para implementornya tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sistem informasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Akan tetapi keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh kemauan para kader tim penggerak PKK untuk memiliki kemauan yang kuat terhadap pelaksanaan sistem informasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang sedang diimplementasikan dilapangan.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, Edward III (dalam Subarsono, 2019) mengemukakan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam faktor disposisi, yaitu:

a. Pengangkatan birokrasi: Disposisi atau sikap para pelaksana dapat menjadi hambatan nyata dalam implementasi sistem informasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga jika personel yang ada tidak menjalankan sistem yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personel untuk pelaksana sistem informasi tersebut haruslah melibatkan individu yang memiliki komitmen terhadap sistem yang telah ditetapkan, terutama dalam mendukung kepentingan masyarakat.

b. Insentif: Salah satu cara untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana dalam memanipulasi insentif adalah dengan memberikan insentif yang sesuai. Secara umum, orang akan bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka, sehingga kebijakan terkait insentif dapat memengaruhi tindakan pelaksana. Dengan menambahkan biaya atau keuntungan tertentu, insentif ini dapat menjadi pendorong bagi pelaksana untuk menjalankan tugas dengan baik, demi memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi sudah memiliki sumber daya yang cukup dan para pelaksana kebijakan memahami apa yang harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakannya, serta memiliki motivasi untuk bertindak, implementasi kebijakan tersebut mungkin masih belum efektif dan dapat menghambat jalannya kebijakan. Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus mendukung keputusan politik dengan cara melakukan koordinasi yang baik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Edward III (dalam Subarsono, 2019) mengidentifikasi dua karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi, yaitu:

1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP adalah serangkaian prosedur rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan atau birokrat untuk melaksanakan tugas mereka setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan, atau standar minimum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Adanya Fragmentasi

Fragmentasi merujuk pada pembagian tanggung jawab atas berbagai kegiatan atau aktivitas di antara beberapa unit kerja, yang memungkinkan lebih banyak unit terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi masih menjadi faktor utama, dan salah satu indikator yang dioperasionalkan dari konsep motivasi adalah sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Sarana dan prasarana ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja mereka, dengan menyediakan fasilitas atau peralatan yang dapat membantu Kader Tim Penggerak

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Berdasarkan teori Desiana (2021), indikator yang berkaitan dengan kinerja Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mencakup motivasi, yaitu kesediaan untuk mengerahkan usaha maksimal menuju tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan individu. Motivasi kerja kader merupakan dorongan internal untuk melaksanakan pekerjaan, dan dengan motivasi yang tinggi, kinerja kader pun akan meningkat, demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa jika fasilitas kerja yang tersedia sesuai dengan kebutuhan Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka suasana kerja yang kondusif akan tercipta, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian tugas. Fasilitas yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup gedung kantor, kendaraan dinas roda dua, alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan gedung, serta alat peraga untuk sosialisasi atau pengarahan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kinerja Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga belum optimal dan masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan wawancara, kemampuan Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada tingkat pengetahuan mereka. Terlebih lagi, Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sudah mendapatkan pelatihan dasar yang mencakup pengetahuan dan cara-cara sosialisasi. Menurut Desiana (2021), kemampuan adalah kapasitas individu dalam menyelesaikan berbagai tugas dalam pekerjaan, yang terdiri dari dua faktor utama, yaitu kemampuan intelektual dan fisik. Kemampuan intelektual mencakup kemampuan mental yang dapat diukur melalui tes IQ, sementara kemampuan fisik melibatkan stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu.

Berdasarkan penelitian dan analisis, ditemukan bahwa efektivitas Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang dimilikinya. Terlebih lagi, para kader tersebut telah mengikuti pelatihan dasar yang mencakup pengetahuan umum, serta prosedur sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Dinas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung mengambil beberapa kebijakan untuk meningkatkan kinerja Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, salah satunya dengan memberikan peluang bagi para kader untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas ini diharapkan dapat memperbaiki efektivitas kerja para kader dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Selain itu, kesempatan promosi jabatan menjadi salah satu bentuk operasionalisasi dari kesempatan untuk berkembang, yang juga menjadi faktor pendorong bagi kader untuk bekerja dalam organisasi. Adanya peluang untuk maju atau berkarier merupakan dorongan alami bagi setiap individu untuk berkembang dan mencapai posisi yang lebih baik. Oleh karena itu, kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga juga menginginkan kemajuan dalam kehidupan mereka.

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan tersebut, peneliti memberikan kesimpulan yakni:

1. Implementasi Sistem Informasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih ada Kader Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung pada saat memberikan informasi dan sosialisasi berlangsung tidak menggunakan Laptop atau LCD sehingga menyebabkan komunikasi membosankan dan kurang menarik.
2. Kinerja Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung masih belum optimal dikarenakan kurangnya fasilitas kerja sehingga menyebabkan tidak optimalnya Kader Tim Penggerak dalam melaksanakan Sistem Informasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Sei Sekambing Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.* Jurnal Penelitian
- Azwar, 2018. *Metode Penelitian*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Budi Sutedja, 2019. *Desain Dan Implementasi Sistem Informasi Berbasis WEB* Penerbit CV Budi Utama. Jakarta
- EUT Rauf dkk, 2004. *Dampak Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.* JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik [PT. Inovasi Sains Nusantara](#)
- Erwan Agus, Tangkilisan, 2018. *Implementasi Kebijakan Publik – Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia* Pustaka Setia Cetakan Jakarta
- George C. Edward III dalam Subarsono, 2019, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Indrayani *et al.*, 2022. *Kinerja Pegawai; Teori Pengukuran dan Implikasi* Graha Ilmu Jakarta
- Mina Khikatul, 2018. *Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Belajar. Yogyakarta
- Muhammad Anshar, 2017. *Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Warga Di Kelurahan Sei Kera Hilir II Medan.* Jurnal Penelitian
- Risa Aprilia, 2021. *Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.* Jurnal Penelitian
- Sugiyono, 2016. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R & D* Gramedia Indonesia Jakarta